



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIFQI TRIATMOJO, SE**

Jabatan : AUDITOR AHLI PERTAMA

Yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator
Perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Dra. IDAYANTI**

Jabatan : Plt. SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH KAB. PURBALINGGA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 2 Januari 2025

Pihak kedua,

Dra. IDAYANTI

NIP. 19670824 199203 2 012

Pihak Pertama

RIFQI TRIATMOJO, SE

NIP. 19930627 201903 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

| No | SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET 2025 |
|----------|---|---|--------------------------|-------------|
| 1 | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Inspektorat Daerah | Presentase Dokumen Perencanaan yang diserahkan tepat waktu | Persen | 100 |
| | - Tersusunnya Dokumen Perencanaan Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 3 |
| 2 | Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Inspektorat Daerah | Presentase Dokumen Laporan yang disusun | Persen | 100 |
| | - Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | 10 |
| 3 | Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Internal | Jumlah Objek Pengawasan yang diperiksa | Objek Pemeriksaan | 154 |
| | - Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja | Laporan | 39 |
| | - Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan | Laporan | 52 |
| | - Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja | Laporan | 123 |
| | - Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Keuangan | Laporan | 1 |
| | - Terlaksananya Pengawasan Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | Laporan | 23 |
| 3 | Ditetapkannya kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan | Presentase kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan | Persentase | 100 |
| | - Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun | Dokumen | 3 |
| 4 | Terlaksananya Pembinaan terhadap OPD Menuju WBK WBBM | Jumlah laporan kegiatan pembinaan terhadap OPD menuju WBK WBBM | Laporan | 5 |
| | - Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Perangkat Daerah | 8 |
| | - Terlaksananya Pendamping - an, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah | 21 |
| | - Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Perangkat Daerah | 8 |

| No | Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran | Ket |
|----------|--|----------------------|-----|
| 1 | Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 21.608.000 | |
| | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15.608.000 | |
| | - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6.000.000 | |
| 2 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 1.115.199.000 | |
| | - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 242.190.000 | |
| | - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 313.026.000 | |
| | - Reviu Laporan Kinerja | 413.732.000 | |
| | - Reviu Laporan Keuangan | 16.774.000 | |
| | - Pengawasan Desa | 129.427.000 | |
| 3 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 77.660.000 | |
| | - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 77.660.000 | |
| 4 | Pendampingan dan Asistensi | 2.320.263.000 | |
| | - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 1.746.493.000 | |
| | - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 73.400.000 | |
| | - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 230.370.000 | |

Pihak Kedua,



Dra. IDAYANTI

NIP. 19670824 199203 2 012

Pihak Pertama,



RIFQI TRIATMOJO, SE

NIP. 19930627 201903 1 008